

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Assesment GCG: Assessment GCG: *Penilaian Aspek
Direksi*



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA
2018**

Assesment GCG: Assessment GCG: *Penilaian Aspek Direksi*

A. PENGERTIAN GCG

Secara umum istilah *governance* lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) tidak lain pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut, dalam keberadaannya penting dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, cepatnya perubahan lingkungan yang berdampak pada peta persaingan global. Sedangkan sebab kedua karena semakin banyak dan kompleksitas stakeholders termasuk struktur kepemilikan bisnis. Dua hal telah dikemukakan, menimbulkan: turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima. **Good Corporate Governance** tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah system pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Sistem pengukuran tersebut, tidak lain konsep BSC. BSC mampu mengukur kinerja komprehensif dan mengakomodasikan kepentingan internal bersama kepentingan eksternal bisnis. Pengukuran kinerja konsep GCG berdasarkan kepada lima dasar, yaitu: perlindungan hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders terkait dengan bisnis, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas dewan komisaris.

B. PENGUKURAN GCG

1. MODEL BHUIYAN BISWAS

Earning **Management Jones Model, modified by Dechow:**

1) Menghitung *total accruals*

$$TAC = Nit - CFOit \dots\dots\dots (1)$$

Where:

TAC : Total akrual

Nit : laba nersih

CFOit : cash flow dari operasi perusahaan

2) Peregresian dengan menentukan β_1 , β_2 , dan β_3

$$TAit/Ait-1 = \beta_1 (1/Ait-1) + \beta_2 (\Delta Revt/Ait-1) + \beta_3 (PPEt/Ait-1) + e \dots\dots\dots (2)$$

Where:

Ait-1 : total asset pada periode t-1

$\Delta Revt$: perubahan pendapatan dalam periode t

PPEt : property, plant, and equipment periode t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

3) Memasukkan koefisien regresi ($\beta_1, \beta_2, \beta_3$) ke rumus *non-discretionary accruals*

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rect_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

..... (3)

Where:

$\Delta Rect$: perubahan piutang bersih dalam periode t

NDA : Non-discretionary accruals

4) Menghitung *non-descretionary accruals*

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it} - NDA_{it} \dots\dots\dots (4)$$

Where:

DA_{it} : discretionary accruals pada periode t

2. MODEL IICG

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep Corporate Governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan patok banding (*benchmarking*).

CGPI yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA merupakan program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat. Sejak tahun 2001 hingga 2012 CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS).

Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh stakeholders dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya.

Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan CG melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya. Penghargaan CGPI Awards dan hasilnya dipaparkan di Majalah SWA dalam Sajian Utama.

Manfaat Mengikuti CGPI

IICG melalui program CGPI membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan CG yang telah dilakukannya dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada sektor yang sama. Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat berikut kepada perusahaan:

- Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung.
- Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi GCG dan pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan.
- CGPI dapat dijadikan indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
- Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

Proses Pemeringkatan Penerapan GCG Dalam CGPI

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG adalah sebagai berikut:

a. *Self-assessment*

Pada tahap ini perusahaan diminta mengisi kuesioner *Self-assessment* seputar penerapan CG di perusahaannya.

b. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan GCG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika ada perubahan, maka revisi harus dilampirkan).

c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG selama tahun yang bersangkutan dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi ke Perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG.

Faktor-faktor Penilaian CGPI.

1. Komitmen

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai unsur yang terkait dengan visi, misi, tata nilai, moral, etika bisnis, etika kerja, etika profesional, dan prinsip-prinsip GCG, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi membangun inisiatif untuk membuat berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi etika yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melibatkan diri dalam proses perumusan berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi etika yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- c. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melibatkan diri dalam pemastian semua dokumen telah diimplementasikan selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- d. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kontemplasi dan refleksi atas kiprah bisnis yang beretika dan bermartabat serta melakukan resolusi.

2. Transparansi

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai regulasi, visi, misi, dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan informasi material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, yang selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis dan kebijakan transparansi perusahaan yang mengintegrasikan berbagai regulasi, visi, misi, dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, yang selaras dengan upaya membangun bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.
- b. Kesungguhan Direksi dan pimpinan perusahaan menyelaraskan strategi dan kebijakan transparansi perusahaan ke dalam berbagai panduan operasional perusahaan di seluruh unit bisnis dan fungsional guna menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara
- c. berkeadilan.
- d. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan, pengukuran, dan evaluasi serta penyempurnaan hasil pencapaian penyelarasan strategi dan kebijakan transparansi perusahaan ke dalam berbagai panduan operasional perusahaan untuk

seluruh unit bisnis dan fungsional dalam berbagai panduan operasional perusahaan untuk seluruh unit bisnis dan fungsional dalam menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengukuapan informasi kepada para pemangku kepentingan, selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.

- e. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan untuk berpartisipasi menjalankan kebijakan transparansi perusahaan yang selaras dengan upaya membangun bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.

3. Akuntabilitas

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi, kewenangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan efektif dalam rangka pengendalian sistem internal Perusahaan dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang harus dilaksanakan secara transparan, wajar dan berkesinambungan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan untuk mengintegrasikan pertanggungjawaban seluruh pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peran semua organ dan anggota perusahaan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
- c. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas inisiatif integrasi dan penyesuaian kebijakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh pencapaian kinerja perusahaan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan dengan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan kepatuhan pada semua jenis peraturan lainnya dalam rangka meningkatkan citra dan martabat perusahaan.

4. Responsibilitas

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan

dengan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berinisiatif mengintegrasikan kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, serta memastikan telah melakukan praktik terbaik pada setiap proses bisnis dalam rangka mewujudkan *good corporate citizenship*.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam merumuskan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan dan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan pada setiap proses bisnis secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai, dan prinsip etika bisnis yang disepakati.
- c. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas berbagai kebijakan, sistem dan prosedur yang menjamin telah sesuaiya pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis yang disepakati.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang kondusif guna mewujudkan tujuan perusahaan berdasarkan penegakan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis yang disepakati.

5. Independensi

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pengelolaan perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan secara profesional, berlandaskan integritas dan mampu mengelola konflik kepentingan serta tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis perusahaan dalam rangka menciptakan profesionalisme dan integritas seluruh organ dan anggota perusahaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka menciptakan profesionalisme dan integritas seluruh anggota organ dan perusahaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.
- c. Kesungguhan Direksi melaksanakan dan melakukan pemantauan serta evaluasi perbaikan atas pelaksanaan inisiatif strategis, kebijakan

perusahaan, dan pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka menciptakan profesionalisme dan integritas seluruh anggota organ dan perusahaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usaha.

- d. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam memunculkan sikap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.

6. Keadilan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pola perilaku organ dan anggota perusahaan serta perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan selalu mengutamakan perlakuan yang setara dan wajar dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis perusahaan dalam rangka mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- c. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan dan melakukan pemantauan serta evaluasi perbaikan atas pelaksanaan inisiatif strategis, kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka menciptakan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan sesuai kebijakan perusahaan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

7. Kompetensi

Aspek ini menunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berkomitmen pada perilaku yang profesional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan tata nilai serta mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berkomitmen pada perilaku yang profesional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan etika pelayanan publik dan nilai-nilai yang berlaku, serta mempromosikan praktik dan perilaku yang

beretika di lembaga publik dan organisasi perusahaan, dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.

- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan menyelaraskan kebijakan pengembangan kompetensi etikal dari sumber daya manusia perusahaan dengan tugas pokok dan fungsinya, dan memastikan sistem rewards dan punishment terlaksana berdasarkan penilaian kesesuaian dengan kamus kompetensi.
- c. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengukuran atas inisiatif integrasi dan penyelarasan kebijakan kompetensi etikal dengan mekanisme evaluasi kompetensi yang mendukung tujuan perusahaan dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi secara aktif menjalankan kebijakan SDM yang etikal dan mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang beretika.

8. Kepemimpinan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengintegrasikan, mendorong, dan menciptakan pola perilaku anggota perusahaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada tata nilai, moral, etika, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam berinisiatif melakukan adaptasi dan integrasi corak kepemimpinan yang dimilikinya dalam rangka mentransformasikan organisasi perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, serta selalu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral, dan etika.
- b. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam menyelaraskan kebijakan pengembangan corak kepemimpinan yang dimilikinya dan selalu mendorong seluruh anggota perusahaan dengan corak kepemimpinan tersebut untuk bertindak mewujudkan perusahaan yang beretika, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral, dan etika, dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
- c. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil pencapaian corak kepemimpinan yang dimiliki dalam rangka mentransformasikan organisasi perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubungan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

- d. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan berpartisipasi dalam memunculkan corak kepemimpinan yang diperukan guna mewujudkan erusahaan yang beretika, selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral dan etika serta strategi dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh para pemangku kepentingan perusahaan.

9. Kemampuan Bekerjasama

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam bekerja sama menanggapi isu-isu yang dihadapi perusahaan dan mengurangi resiko di setiap tingkatan untuk mendapatkan solusi terbaik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan berinisiatif membangun kerjasama antar organ perusahaan guna mengurangi resiko pada setiap tingkatan dan memastikan praktik teraik serta membangun kerjasama dalam memecahkan sejumlah masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi perusahaan.
- b. Kesungguhan Direksi perusahaan berinisiatif membangun kerjasama lintas fungsional dalam mengurangi resiko pada tingkatan dan memastikan praktik terbaik serta membangun kerjasama dalam memecahkan sejumlah masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi perusahaan pemangku kepentingan.
- c. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas terbentuknya iklim kerjasama yang beretika di dalam perusahaan guna mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam menciptakan iklim kerja sama yang beretika guna mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.

10. Visi, Misi dan Tata Nilai

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji kembali visi, misi, tata nilai, agar senantiasa sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji ulang visi, misi, tata nilai, sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.
- b. Kesungguhan Direksi dan Pimpinan perusahaan menyelaraskan visi, misi, dan tata nilai perusahaan dengan pelaksanaan bisnis yang beretika

dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan ke dalam seluruh unit bisnis dan fungsional perusahaan.

- c. Kesungguhan Dewan Komisaris, Direksi dan pimpinan perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil penyelarasan visi, misi, dan nilai perusahaan dengan pelaksanaan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.
- d. Kesungguhan anggota perusahaan untuk memahami dan melaksanakan visi, misi, tata nilai, sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.

11. Strategi dan Kebijakan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai analisis eksternal dan internal selaras dengan tata nilai prinsip-prinsip bisnis yang etikal dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinisiatif melakukan adaptasi dan integrasi data, informasi, sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menetapkan strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai, dan tujuan perusahaan serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
- b. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam menyelaraskan strategi dan kebijakan perusahaan dengan fungsi dan program kerja perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai dan tujuan perusahaan, serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
- c. Kesungguhan Dewan Komisaris dan manajemen puncak perusahaan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil pencapaian pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai, tujuan perusahaan, serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
- d. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan berpartisipasi untuk memahami dan menjalankan strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai, tujuan perusahaan serta mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

12. Etika

Aspek ini mewujudkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai tata nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif pembuatan kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- b. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan berbagai kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- c. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi memastikan semua kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang telah diimplementasikan selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- d. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan bisnis yang sehat dan bermartabat serta melakukan inisiatif penyempurnaan dokumen.

13. Iklim Etikal

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam menciptakan suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji, mengunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

- a. Kesungguhan para pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi untuk mengunjung tinggi norma dan standar yang berlaku dan disepakati dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- b. Kesungguhan para pemangku kepentingan memiliki keleluasaan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- c. Kesungguhan para pemangku kepentingan dalam membangun dan membina hubungan kerja antar mitra berlangsung secara profesional dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
- d. Kesungguhan para pemangku kepentingan memunculkan kinerja yang dicapai secara etikal dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.

A. Model Performance Perusahaan (Tobin's Q, CAMEL (perbankan), rasion keuangan).

Firm Performance (Tobin's Q)

The Indonesian Institute of Corporate Governance telah melakukan penelitian akan adanya hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan metode pengukuran Tobin's Q :

$$\text{Tobin's Q} = (\text{QTOBIN}) = (\text{EMV} + \text{D}) / (\text{EBV} + \text{D})$$

Dimana:

Tobin's Q : Firm Performance

EMV : Equity Market Value (harga penutupan saham di akhir tahun buku)

D : Debt: (utang lancar – aktiva lancar) + nilai buku sediaan + utang jangka panjang

EBV : Equity Book Value: total asset – total kewajiban

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan di perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pengukuran variable *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance, 2002). Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya, hanya variabel *corporate governance* yang secara signifikan mempengaruhi *return on equity*. Sedangkan tidak ada satupun variabel control yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan.

Earning Management

(Modified Jones Model Dechow, et. al 1995)

Secara matematis *Tobin's Q* dapat dihitung dengan formula rumus sebagai berikut:

$$q = (\text{MVS} + \text{MVD}) / \text{RVA}$$

Dimana:

MVS = Market value of all outstanding stock

MVD = Market value of all debt

RVA = Replacement value of all production capacity

Perusahaan dengan q_s yang tinggi, atau $q_s > 1,00$ memiliki peluang investasi yang baik (Lang, Stulz & Walking, 1989), memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi (Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969) dan menunjukkan bahwa manajemen memiliki performa yang baik dengan aktiva dalam pengelolaannya. Mengingat bahwa dalam simulasi permainan, q memiliki predictive validity sebagai high performing firms

indicator, dan benar dalam dunia nyata perusahaan, maka q dapat digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan perusahaan.

Di dalam penggunaan Tobin's Q mengalami modifikasi. Modifikasi Tobin's Q versi Chung dan Pruitt (1994) telah digunakan secara konsisten karena disederhanakan di berbagai simulasi permainan. Formulasi rumusnya sebagai berikut :

$$q = (MVS + D) / TA$$

Dimana :

MVS = Market value of all outstanding shares.

D = Debt

TA = Firm's asset's.

Market value of all outstanding shares (MVS) merupakan nilai pasar saham yang diperoleh dari perkalian jumlah saham yang beredar dengan harga saham (outstanding Shares * Stock Price). Debt merupakan besarnya nilai dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$D = (AVCL - AVCA) + AVLTD$$

Dimana :

AVCL = Accounting value of the firm's Current Liabilities.

= Short Term Debt + Taxes Payable

AVLTD = Accounting value of the firm's Long Term Debt

= Long Term Debt.

AVCA = Accounting value of the firm's Current Assets.

= Cash + Account Receivable + Inventories.

Interpretasi dari skor Tobin's Q adalah sebagai berikut :

Skor Interpretasi

Tobin's Q < 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi undervalued. Manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva. Potensi pertumbuhan investasi rendah.

Tobin's Q = 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi average. Manajemen stagnan dalam mengelola aktiva. Potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.

Tobin's Q > 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi overhead. Manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi tinggi.

Berdasarkan penjelasan dalam interpretasi tersebut di atas, maka investor yang akan mengejar capital gain dapat mengambil keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham yang dimilikinya. Tobin's Q didasarkan pada pandangan bahwa nilai pasar modal merupakan nilai keseluruhan modal terpasang dan insentif yang diinvestasikan.

Menurut Smithers dan Wright (2007:40) keunggulan *Tobin's Q* adalah :

- Tobin's Q mencerminkan asset perusahaan secara keseluruhan.
- Tobin's Q mencerminkan sentiment pasar, misalnya analisis dilihat dari prospek perusahaan atau spekulasi.
- Tobin's Q mencerminkan modal intelektual perusahaan.
- Tobin's Q dapat mengatasi masalah dalam memperkirakan tingkat keuntungan atau biaya marjinal.

Menurut Smithers dan Wrigt (2007:40) kelemahan Tobin's Q adalah :

- Tobin's Q dapat menyesatkan dalam pengukuran kekuatan pasar karena sulitnya memperkirakan biaya atas pergantian atas harta, pengeluaran untuk iklan dan penelitian serta pengembangan menciptakan asset tidak berwujud.

a. Pengukuran Kinerja Perbankan

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003:2). Menurut Dictionary Banking and financial service by Jeery Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposit membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan surat berharga, menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2006:4)

Menurut Undang - Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bank adalah badann usaha yang aktivitasnya menghimpun dana berupa deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyrarakat yang membutuhkan dana.

Peraturan Bank Indonesia No. 6 / 10 / PBI / 2004 tanggal 12 April tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilain factor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap factor – factor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi

dari factor – factor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Penilaian faktor – faktor komponen dilakukan dengan sistem kredit (system reward) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai 100. Hasil kuantitatif dari komponen – komponen tersebut dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek – aspek lain yang secara material berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing – masing faktor. Tingkat kesehatan bank digolongkan dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank – bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik ata bahkan dihentikan operasinya.

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam Undang – Undang RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah :

- Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- Bank Indonesia menetapkan ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip – prinsip kehati – hatian.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan di perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pengukuran variable *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance, 2002). Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya, hanya variabel *corporate governance* yang secara signifikan mempengaruhi *return on equity*. Sedangkan tidak ada satupun variabel control yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan.

Earning Management
(Modified Jones Model Dechow, et. al 1995)

Scott dalam Sanjaya menjelaskan ada empat pola praktik peneglolaan laba, yaitu:

1. Taking a bath
Hal ini dapat terjadi selama periode stress atau reorganisasi termasuk penempatan seorang CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, maka manajemen merasa lebih baik atau sekaligus melaporkan kerugian yang lebih besar.
2. Minimalisasi laba
Pola ini hamper sama dengan *taking a bath* tetapi kurang ekstrim. Pola ini dipilih untuk menghindari pengawasan perusahaan secara politik.
3. Maksimalisasi laba
Manajer menggunakan cara memaksimalkan laba bersih untuk tujuan bonus. Perusahaan yang hampir melanggar perjanjian utang mungkin melakukan maksimalisasi laba.
4. Perataan laba
Manajer mempunyai cara untuk meratakan laba yang disisakan untuk *bogey* dan *cup*. Sebaliknya, earnings mungkin secara permanen atau temporer tidak cukup untuk tujuan bonus. Lebih lanjut, jika manajer adalah *risk-averse*, mereka akan memilih pengurangan variabel aliran bonus. Manajer melakukan pemerataan laba karena tindakan ini dapat mengurangi kemungkinan untuk diganti.

Manajer melakukan pengelolaan laba dengan melalui pemilihan metode akuntansi yang diizinkan, yaitu dengan melakukan manipulasi pendapatan dan biaya serta aktivitas perusahaan yang tidak normal dilakukan. Sebagian besar, pengelolaan laba bersifat legal dan tidak melanggar standar akuntansi yang telah ditetapkan. Tekanan persaingan untuk menghasilkan laba yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak etis. Hal ini dialami oleh beberapa perusahaan terutama perusahaan yang menilai perusahaan dari kinerja akuntansi dan laba yang diperoleh.

Earning Management Jones Model, modified by Dechow:

1. Menghitung *total accruals*

$$TAC = Nit - CFOit \dots\dots\dots (1)$$

Where:

TAC : Total akrual

Nit : laba nersih

CFOit : cash flow dari operasi perusahaan

2. Peregresian dengan menentukan β_1 , β_2 , dan β_3

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t/A_{it-1}) + e \dots \dots \dots$$

(2)

Where:

- Ait-1 : total asset pada periode t-1
- ΔRev_t : perubahan pendapatan dalam periode t
- PPEt : property, plant, and equipment periode t
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

3. Memasukkan koefisien regresi (β_1 , β_2 , β_3) ke rumus *non-discretionary accruals*

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t/A_{it-1} - \Delta Rect_t/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t/A_{it-1}) \dots \dots \dots$$

(3)

Where:

- $\Delta Rect_t$: perubahan piutang bersih dalam periode t
- NDA : Non-discretionary accruals

4. Menghitung *non-descretionary accruals*

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it} - NDA_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Where:

- DAit : discretionary accruals pada periode t

Ujiyantho dan Pramuka meneliti tentang mekanisme *corporate governance*, manajemen laba, dan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini *variable corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan laba dan variabel tersebut secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba. Sedangkan pengelolaan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengelolaan laba menghasilkan kesimpulan:

- Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laba. Perusahaan yang besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi menurunkan laba untuk mengurangi pembebanan pajak yang tinggi dan *political cost*, akibatnya laba yang dilaporkan mengandung akrual tinggi dan berkualitas rendah.
- Kualitas audit mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan, artinya KAP Big 4 tidak mempengaruhi pengelolaan laba, akan tetapi tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk

berinvestasi. Hal ini dimungkinkan KAP bukan merupakan proksi kualitas laba yang tepat di Indonesia.

- Proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu proksi *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengelolaan laba. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa dewan komisaris dari luar tidak dapat mengurangi praktik pengelolaan laba oleh manajemen. Hal ini dimungkinkan kinerja yang dilakukan oleh komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham belum maksimal.
 - Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengelolaan laba, artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi pengelolaan yang terjadi di perusahaan.
- Audit Opinion

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan Yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*).

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

- Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
- Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.

- Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak direview.
- Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya jauh menyimpang dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
- Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila:

- ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang wajar.
- Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph terpisah yang dicantumkan sebelum paragraph pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam satu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat, oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan satu mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

- Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substansif yang mendukung pernyataan tersebut
- Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Jika opini audit menyatakan bahwa suatu perusahaan *going concern*, maka nilai perusahaan bertambah 1. Namun jika opini audit menyatakan perusahaan tersebut tidak *going concern*, maka nilainya 0.

Beberapa studi menemukan bahwa seorang auditor lebih sering menyatakan suatu perusahaan *going concern* apabila pada tahun sebelumnya perusahaan tersebut juga dinyatakan *going concern*.

Going concern sendiri adalah pernyataan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan likuidasi jangka waktu dekat.

Financial Report Disclosure

Pengungkapan laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency*, dimana sebuah entitas harus mengedepankan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. *Good Corporate Governance* secara implisit mengisyaratkan adanya transparansi terkait informasi keuangan yang reliabel dan relevan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai informasi tentang laba yang diperoleh.

Semakin transparan dan semakin jelas terlihat keadaan perusahaan, maka tindak penyelewengan dapat ditekan bahkan ditiadakan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan yang mumpuni atau mencukupi akan diberi 1 poin.

Pengungkapan laporan keuangan yang hampir baik akan mendapat 2 poin.

Pengungkapan laporan keuangan yang baik atau menyeluruh akan mendapat 3 poin.

Firm Value

Nilai suatu perusahaan dapat ditentukan dengan membandingkan harga per saham dengan laba per saham. Perhitungannya menggunakan rumus *Price Earnings Ratio* atau rasio harga terhadap laba. PE Ratio sendiri adalah ukuran hubungan antara harga pasar saham perusahaan dan profitabilitasnya.

$$\text{PE Ratio} = \frac{\text{market price per share}}{\text{annual earning per share}}$$

Dan untuk mengetahui berapa jumlah *earning per share* digunakan rumus berikut:

$$\text{Earning per Share} = \frac{\text{laba operasi} - \text{dividen saham prioritas}}{\text{rata-rata tertimbang saham yang beredar}}$$

Belief Revision / Adjustment

Revisi kepercayaan adalah proses mengubah keyakinan untuk memperhitungkan informasi baru. Yang logis formalisasi revisi keyakinan yang diteliti dalam filsafat dalam database dan kecerdasan buatan untuk desain agen rasional. Yakni informasi baru tentang situasi saat ini, sedangkan keyakinan lama mengacu pada masa lalu, update pengoprasian mengubah keyakinan lama untuk memperhitungkan perubahan, sedangkan revisi yakni kedua keyakinan lama dan informasi baru mengacu pada situasi yang sama, sebuah inkonsistensi antara informasi baru dan lama dijelaskan oleh kemungkinan informasi lama yang kurang dapat diandalkan dibandingkan yang baru, revisi adalah proses memasukkan informasi baru kedalam set dari keyakinan selama tanpa menghasilkan inkonsistensi.

Asumsi utama revisi keyakinan adalah bahwa perubahan minimal; pengetahuan sebelum dan sesudah perubahan harus semirip mungkin. Dalam kasus pembaharuan, prinsip in meresmikan asumsi inersia sedangkan dalam kasus revisi, memberlakukan informasi sebanyak mungkin untuk dipertahankan oleh perubahan itu.

Dua jenis perubahan biasanya dibedakan menjadi memperbaharui dan revisi. Memperbaharui Belief Revision adalah suatu studi yang dilakukan untuk memberikan jawaban saat serangkaian informasi dapat mengubah keyakinan investor dalam membuat keputusan.

Kombinasi antara informasi positif dan informasi negatif dengan serangkaian kemungkinan dan tipe informasi disebut dengan information mixed (informasi campur), sehingga akan bernilai 1 jika informasi negatif berubah menjadi informasi positif, bernilai 0 jika informasi positif berubah ke informasi negatif, bernilai 1 jika informasi positif berubah menjadi informasi positif dan 0 apabila informasi negatif tetap menjadi informasi negatif.